



Kementerian PPN/
Bappenas



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

STRATEGI PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN UPAYA PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Pungkas Bahjuri Ali, STP., MS., Ph.D

Stah Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs
Kementerian PPN/Bappenas

*Disampaikan pada Acara The 2nd LSPR Sustainability &
Public Relation Summit 2025
Jakarta, 31 Juli 2025*



Capaian Penanggulangan Kemiskinan Indonesia

Kemiskinan Ekstrem



2022
2,5%

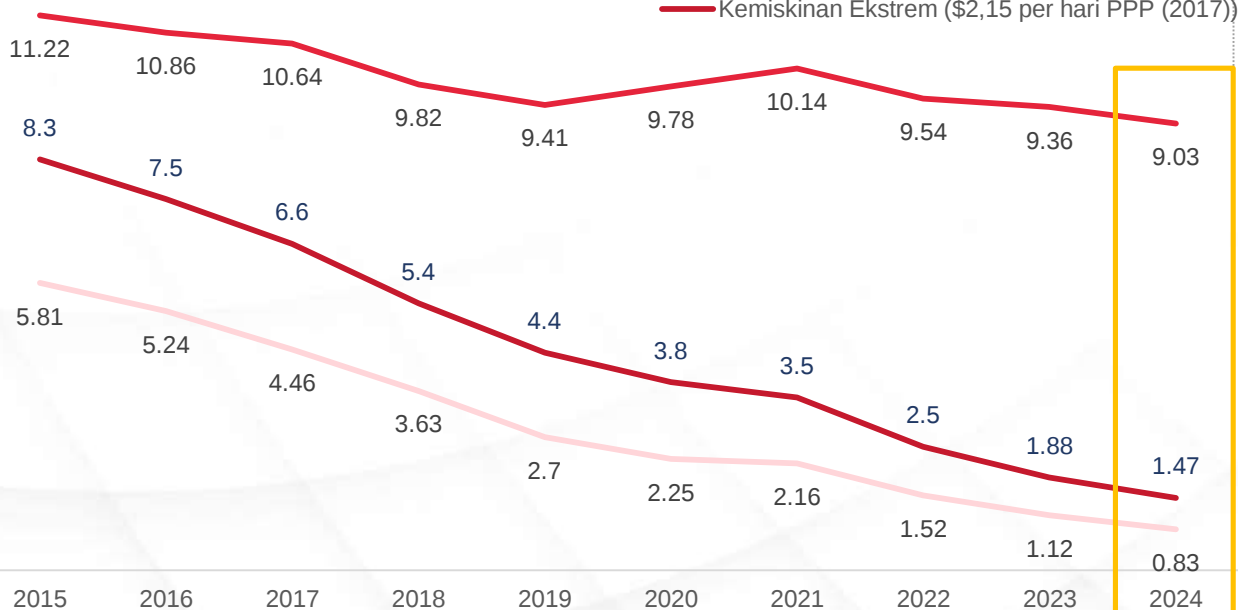


2024
1,47%

Tingkat kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional terus menurun, sejalan dengan upaya reformasi sistem perlindungan sosial yang didukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

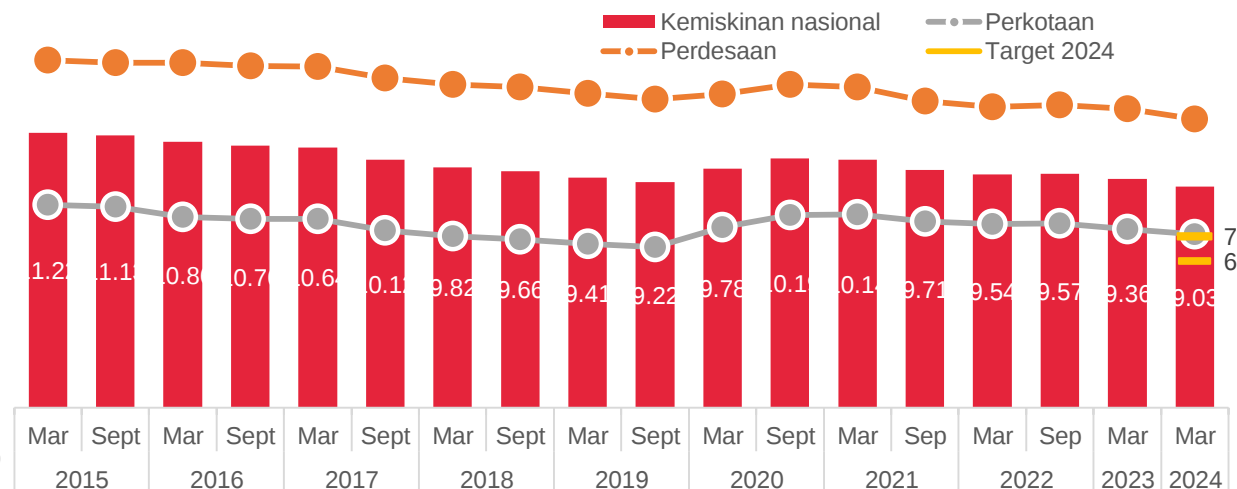
Indikator kemiskinan ekstrem disesuaikan dengan UNSTAT Metadata menggunakan (\$ 2,15 per hari PPP 2017) yang disesuaikan untuk laporan global

— Kemiskinan Nasional
— Kemiskinan Ekstrem (\$2,15 per hari PPP (2017))



Sumber: BPS dan Bank Dunia

Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan



Sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

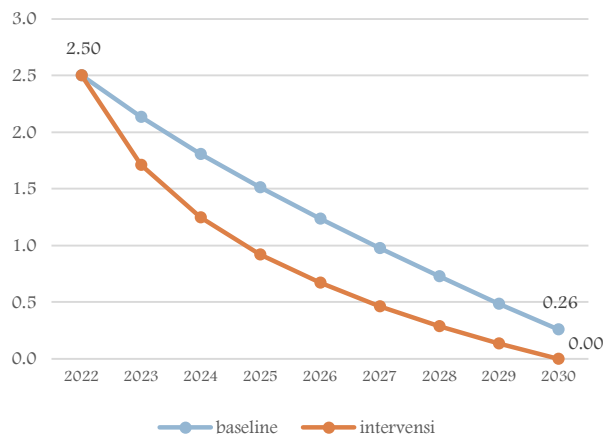


Terdapat kecenderungan penurunan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan terhadap APBN.

Sumber: Kemenkeu

Proyeksi SDGs untuk Penurunan Kemiskinan Indonesia

1.1.1* Proyeksi Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Peta Jalan TPB/SDGs



Tingkat Kemiskinan
Ekstrem pada Tahun
2030:

Skenario BAU

0,26%

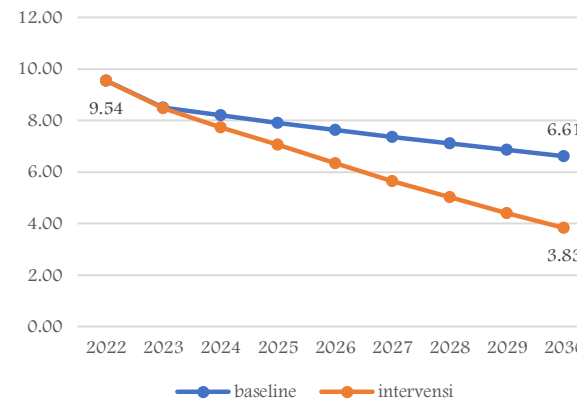
Skenario intervensi

0,00%

Sumber: Roadmap SDGs 2023-2030, Bappenas. PPP \$2,15 tahun dasar 2017.

*Skenario BAU: MethodX, Intervensi Logaritm

1.2.1* Proyeksi Kemiskinan Nasional berdasarkan Peta Jalan TPB/SDGs



Tingkat Kemiskinan
GKN pada Tahun
2030:

Skenario BAU

6,61%

Skenario intervensi

3,83%

Sumber: Roadmap SDGs 2023-2030, Bappenas.

*Skenario BAU dan Intervensi, Direktorat Bappenas

Sumber :Peta Jalan TPB SDGs

Existing strategies/policies

Indikator 1.1.1* dan 1.2.1*

- Pertumbuhan ekonomi yang *sustained* dan *broad-based* (Inklusif, *pro-poor*, *pro-jobs*) melalui transformasi ekonomi dan reindustrialisasi
- Investasi pada SDM (peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan dasar, Peningkatan profesionalisme guru, strategi penurunan stunting)
- Perlindungan Sosial (PKH, Bidikmisi/KIP, BPNT, KIS, dll)
- *No one left behind* (Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim)
- Strategi penurunan informalitas dan perlindungan tenaga kerja (Peningkatan inklusi finansial (cross-cutting, Penguatan dan penegakan regulasi dunia usaha terkait jaminan sosial ketenagakerjaan)

Kekuatan dan Tantangan

Indikator 1.1.1* dan 1.2.1*

- *China's advanced industrialization*
- Investasi pada sumber daya manusia → pilar utama dalam Visi Indonesia 2045
- *Stalled industrialization*
- Ketimpangan tinggi mempengaruhi stunting
- *Fiscal space* rendah (Anggaran perlintsos)

Ruang perbaikan

Indikator 1.1.1* dan 1.2.1*

- Reindustrialisasi (seperti hilirisasi), tetap bersifat *pro-poor*, *pro-job*, *pro productivity*
- No one left behind (lansia, difabel, perempuan, daerah tertinggal) data
- Fokus pada Perempuan lansia di daerah tertinggal
- Penyempurnaan regulasi (*clearer directives*)
- Aggressive monitoring untuk asuransi difabel
- Edukasi pengurangan stigma
- Pengembangan daerah tertinggal yg konsisten dengan IT dan *green economy*

Tantangan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia



Akurasi Program Bantuan Sosial masih rendah

- Program Sembako: 37,3 (2023)
- PKH: 33,7% (2023)
- PIP: 41,3% (2023)
- PBI: 53,8% (2023)
- Rata-rata: 41,5% (2023)

(Susenas, 2023)



Ancaman Bencana Alam

- Selama 2022, terdapat lebih dari 2 juta orang terdampak bencana dengan lebih dari 10 ribu rumah dan fasilitas umum yang rusak.
- 43% dari seluruh bencana yang terjadi di Indonesia merupakan banjir

(BNPB, 2023)



Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas

Tingkat Kemiskinan Penyandang disabilitas cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 13.81% jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional sebesar 9,36% pada tahun 2023.

(Susenas, 2023)



Pekerja Lansia

Sebanyak 53,93% lansia masih aktif bekerja.

(Sakernas BPS, Agustus 2023)



TPAK Perempuan Masih Rendah

TPAK Perempuan 60,18% sedangkan TPAK laki-laki 86,97% (2023). Partisipasi perempuan di pekerjaan formal lebih rendah lagi, yakni hanya sebesar 35,75% di tahun 2023.

(Sakernas BPS, 2023)



Rendahnya kepesertaan pekerja informal pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih bias pekerja formal. Pekerja Bukan Penerima Upah yang terlindungi baru sebesar 7,49% . (BP Jamsostek, Sakernas BPS, Mei 2023, diolah)
- Pemahaman program jaminan sosial dan kepatuhan peserta masih rendah
- Iuran dan Manfaat belum seimbang, sehingga mengancam keberlangsungan program



Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati

- Masih sekitar 12,4% instansi yang baru mengirimkan data balikan untuk pemanfaatan data kependudukan (Ditjen Dukcapil, Oktober 2023)
- Perencanaan pembangunan masih belum menggunakan data adminduk sebagai basis data.

Target Kemiskinan dalam RPJPN 2025 - 2045 dan RPJMN 2025 - 2029

Perindungan Sosial yang

Adaptif

Sasaran
Utama: Tk.
Kemiskinan

2025: 7,0-8,0

2029: 4,5-5,0

2045: 0,5-0,8



Tingkat kemiskinan

7,0 –
8,0
(2025)

4,5 –
5,0
(2029)



Proporsi penduduk kelas
menengah

17,
5
(2025)

20
(2029)



Persentase penyandang
disabilitas yang bekerja di
sektor formal

10
(2025)

12
(2029)



Cakupan kepesertaan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

32,15
(2025)

43,92
(2029)

Keterangan: *) sedang dalam perhitungan

- Fokus pemerintah pada RPJMN 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan nasional. Kemiskinan ekstrem di tahun 2024 diperkirakan tercapai sesuai **target RKP 2024: 0-1 persen**.
- Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah mencapai target penurunan kemiskinan nasional.



Beberapa Intervensi yang menjadi

- Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek
- Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat
- Pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan
- Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan

Sumber Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas

Strategi dan Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif dalam RPJPN 2025-2045

STRATEGI

1. Satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi
2. Peningkatan usia pensiun bertahap dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi selama pensiun
3. Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.
4. Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja
5. Penyelarasan peraturan perlindungan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Penguatan (SJSN) penentuan target, manfaat, dan mekanisme
7. Pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat
8. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap kelompok rentan
9. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
10. Inovasi pembiayaan untuk memperkuat & memperluas cakupan integrasi perlin sos yang kesinambungan utamanya social impact bonds, social impact investment dan optimalisasi dana jansos.

ARAH KEBIJAKAN

Transformasi perlindungan sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial, bansos berdasarkan status kerentanan, jansos, dan kesempatan kerja dan berwirausaha kepada seluruh masyarakat baik pada kondisi tanpa bencana maupun dengan bencana.

Untuk Semua Penduduk

- Sesuai siklus hidup
- Seluruh wilayah
- Sesuai kerentanan dan kondisi kesejahteraan

Pada Semua Layanan

- Pengurangan beban pengeluaran
- Perlindungan berdasarkan kontribusi
- Manfaat tunai dan non tunai (Pemberdayaan dan pelatihan)

Oleh Semua Masyarakat

- Partisipasi swasta & masyarakat
- Partisipasi pusat-daerah

Perlindungan Sosial yang Adaptif

“Setiap penduduk mendapatkan perlindungan sosial sepanjang siklus hidup yang menghindarkan dari kemiskinan dan mempertahankan kehidupan yang layak”

TARGET 2045

**Tingkat Kemiskinan
0,5 – 0,8 %**

**Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
99,5 %**

**Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
60 %**

Arah Kebijakan Dan Strategi Perlindungan Sosial yang Adaptif RPJMN 2025-2029

Data seluruh penduduk terperinci dan mutakhir

Cakupan kependudukan dan catatan sipil yang menyeluruh

1. Akses pada aset produktif: lahan, modal
2. Keberpihakan
3. Kapasitas individu dan komunitas

Pemberdayaan Masyarakat

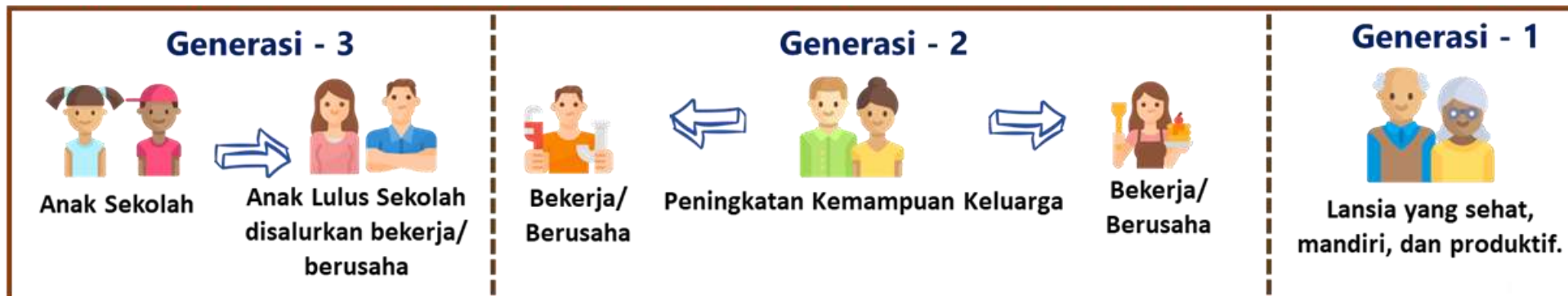
1. Iklim ketenagakerjaan mendukung
2. Lapangan kerja produktif
3. *Reskilling* dan *upskilling*

Kesempatan Kerja

1. Fokus pada koperasi
2. Pemasaran dan kemitraan
3. Akses, kapasitas, dan perlindungan usaha

Kesempatan Wirausaha

Kesempatan yang setara dan lingkungan yang inklusif menuju graduasi dan mobilitas sosial ke arah kelas menengah



Perlindungan melalui bantuan sosial dan jaminan sosial yang adaptif dan terintegrasi untuk seluruh penduduk



Pendamping pembangunan yang berkualitas

Keterlibatan pihak swasta dan pihak non-pemerintah

Strategi Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan SDM Berkualitas



Strategi Penurunan Kemiskinan

(4,5 – 5%) dan Peningkatan Proporsi Kelas Menengah (38%)



Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan & Inovatif melalui Kartu Usaha Produktif dan Afirmatif



Perlindungan Sosial yang Integratif, Adaptif dan Inklusif melalui Kartu Kesejahteraan (KIS, PKH, KIP, PBI, subsidi LPG dan Listrik)



Peningkatan Akses Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Pangan dan Perumahan)



Program Kewilayahan, Konektivitas, Pasar Kerja, dan Lainnya



Satu Data Referensi (Regsosek)



Strategi Peningkatan SDM Berkualitas

(Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,61)

1. Peningkatan layanan dasar

- ✓ Percepatan wajib belajar 13 tahun
- ✓ Penuntasan Tuberculosis
- ✓ Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
- ✓ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
- ✓ Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, tenaga medis, dan tenaga Kesehatan

2. Peningkatan modal manusia

- ✓ Makan bergizi untuk siswa dan ibu hamil (89,9 juta orang 2029)
- ✓ Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
- ✓ Revitalisasi Sarana dan Prasarana sekolah dan madrasah
- ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas

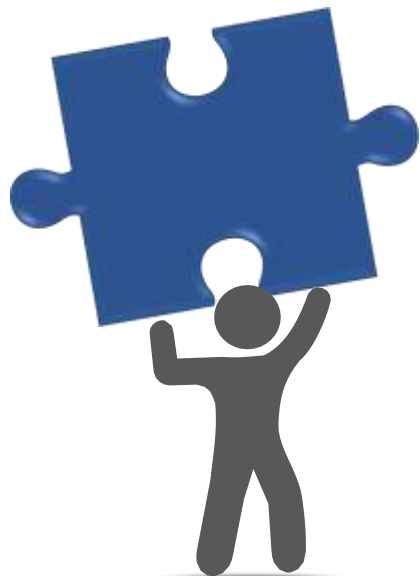
3. Peningkatan modal sosial budaya

- ✓ Pendidikan Karakter, Kewargaan, Agama dan Budaya
- ✓ Pendidikan keluarga dan pengasuhan

Reformasi Sistem Perlindungan Sosial untuk Peningkatan Kesejahteraan Penduduk

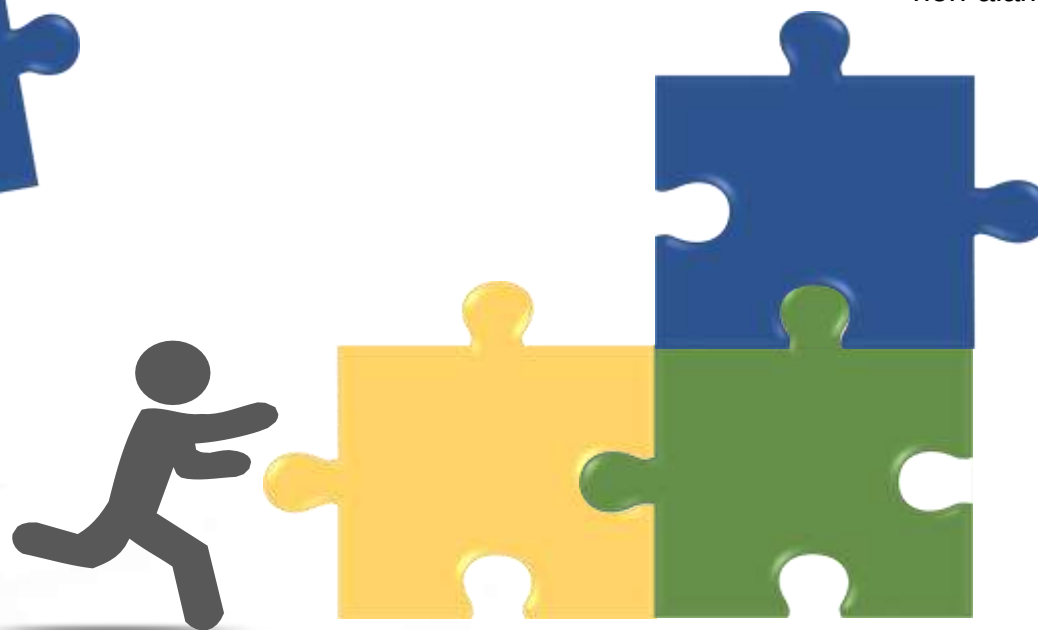
1 TRANSFORMASI DATA MENUJU REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

Perbaiki data dan sistem pendataan terintegrasi mencakup seluruh penduduk.



2 PENGEMBANGAN SKEMA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF

Skema perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap bencana (alam dan non-alam) serta perubahan iklim.



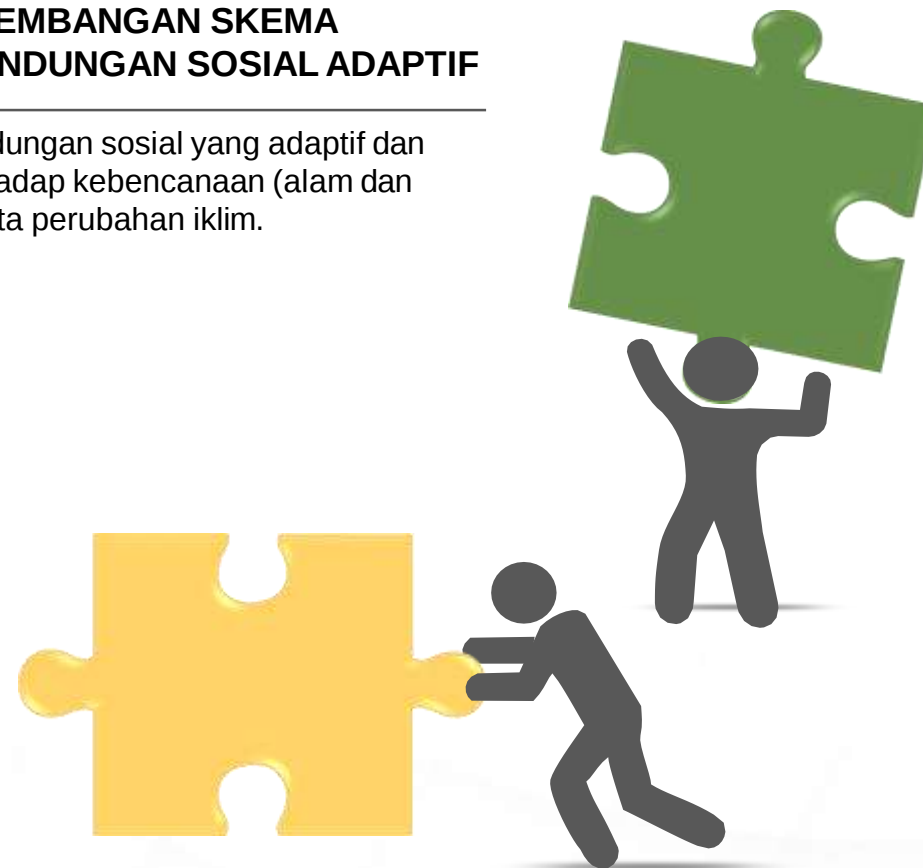
3 PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

Penggunaan berbagai kanal layanan keuangan dalam penyaluran bantuan.

Sumber Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas

4 REFORMASI SKEMA PENDANAAN

Pengembangan skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan.



5 INTEGRASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Integrasi dan koordinasi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan.

Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Menuju Kemandirian Penduduk

Miskin

Rentan

Menuju Menengah

Menengah

Pengurangan Beban melalui Perlindungan Sosial

Memperbaiki kondisi saat ini
yang kurang tepat sasaran
dan tidak terintegrasi

Bantuan sosial
komprehensif: Sembako,
PKH, PIP, PBI JKN, subsidi
LPG, dan subsidi listrik.

PKH dikurangi. Sembako,
PIP, PBI JKN, dan LPG tetap
tersedia sesuai
kerentanan.

Tidak menerima bantuan
sosial. Sebagian mendapat
layanan sosial, subsidi, dan
PBI jaminan sosial.

Tidak menerima bantuan sosial dan
subsidi. Menjadi peserta jaminan sosial
berbasis iuran mandiri. Masih bisa
mendapat layanan sosial.

Graduasi 1

Graduasi 2

Graduasi 3

Peningkatan Kesempatan Kerja & Usaha melalui Pemberdayaan Ekonomi

Memperbaiki kondisi saat ini
yang cakupannya sangat
rendah dan terfragmentasi di
16 K/L

+ PENA, ATENSI, Tenaga Kerja
Mandiri (TKM), Pemberdayaan
untuk Petani dan Nelayan

- ➡ Penguatan motivasi usaha
- ➡ Pelatihan awal wirausaha
- ➡ Pelatihan kerja dasar

+ PLUT, Pra Kerja, UMI, Perhutanan
Sosial, TORA, Tenaga Kerja
Mandiri (TKM), PBK di BPVP/PBK

- ➡ Pelatihan teknis, manajerial
dan konsultasi usaha
- ➡ Peningkatan kapasitas kerja
- ➡ Akses modal rintisan dan
aset produktif

+ PLUT, Pra Kerja, KUR, TKM
Lanjutan, PBK di BPVP/PBK

- ➡ Pendampingan dan
konsultasi usaha
- ➡ Penguatan kapasitas kerja
lanjutan
- ➡ Akses modal lebih besar

+ Pembiayaan *Startup*, PLUT,
Program Vokasi

- ➡ Inkubasi usaha
- ➡ *Skill development* sepanjang
hayat (*long-life learning*)
- ➡ Akses terhadap kredit usaha
menengah

Bantuan Non-Tunai

+

Transfer Aset

+

Kredit & Tabungan

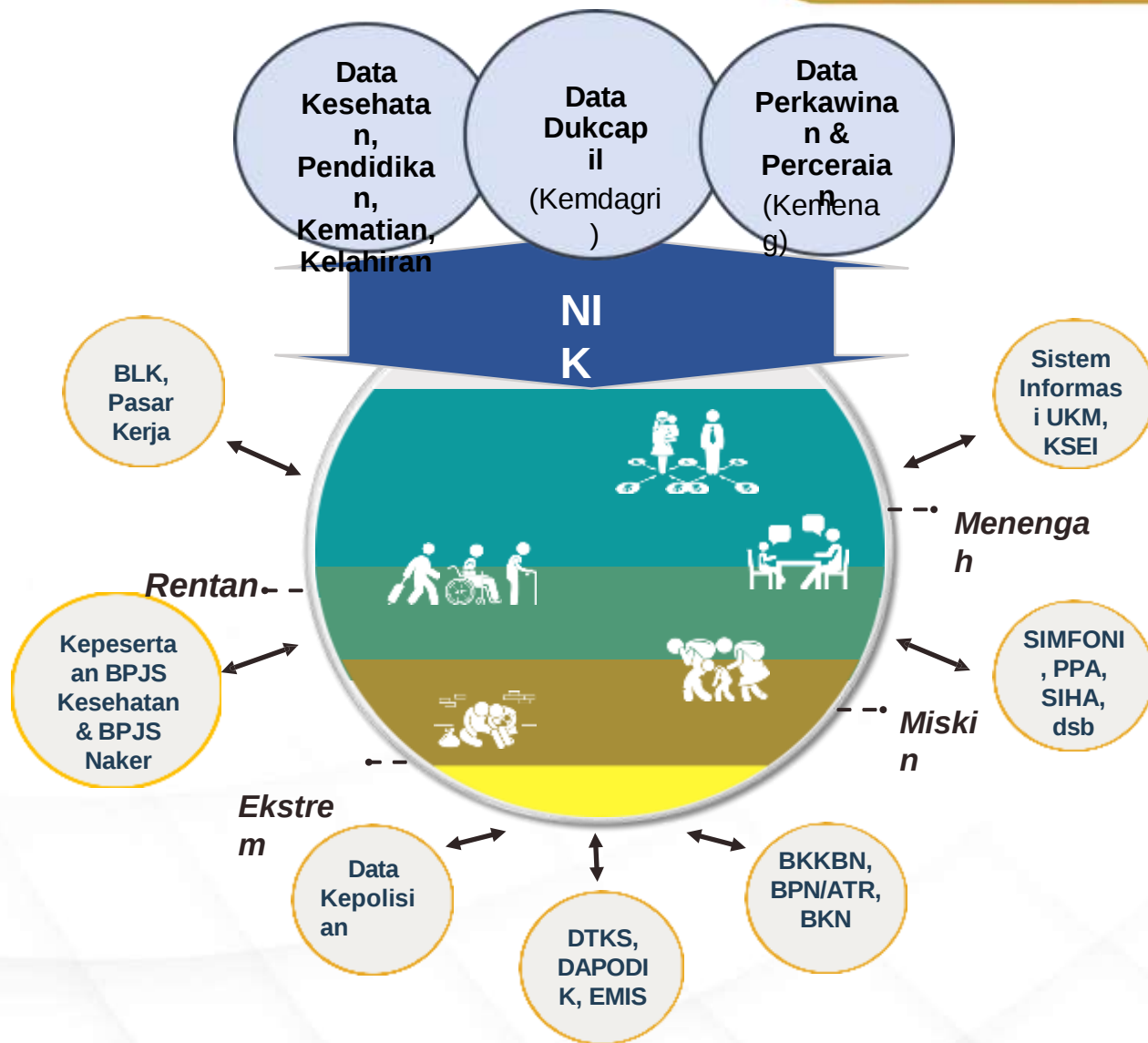
+

Pelatihan & Pembinaan

=

Graduasi

Regsosek Mendukung Satu Data Kemiskinan Indonesia



Registrasi Sosial Ekonomi terintegrasi dengan beberapa jenis data dan dapat dimutakhirkan oleh berbagai pihak untuk **mewujudkan SATU DATA INDONESIA**.

Mengintegrasikan sistem informasi dari Kementerian/Lembaga/program/instansi yang memiliki data lengkap penerima untuk memberikan gambaran **registrie manfaat (integrated beneficiary)**.

Regsosek tidak menghilangkan wewenang K/L. Dengan membangun satu sistem dan bagi-pakai bersama, kita akan **memiliki data yang konsisten**.

Hasil Pendataan Awal Regsosek



Total **150.681** Forum Konsultasi Publik (FKP) telah dilaksanakan di 514 Kabupaten/Kota dan **didapatkan jumlah keluarga terkonfirmasi:**

Total keluarga **78.318.709**

Total Individu **251.280.047**

99,98
%

Data Regsosek telah **dipadankan** dengan Data SP2020 dan *web-service* BPS Kabupaten/Kota.

Tahap Selanjutnya



Data *by-name by-address*

Hasil Pendataan Awal

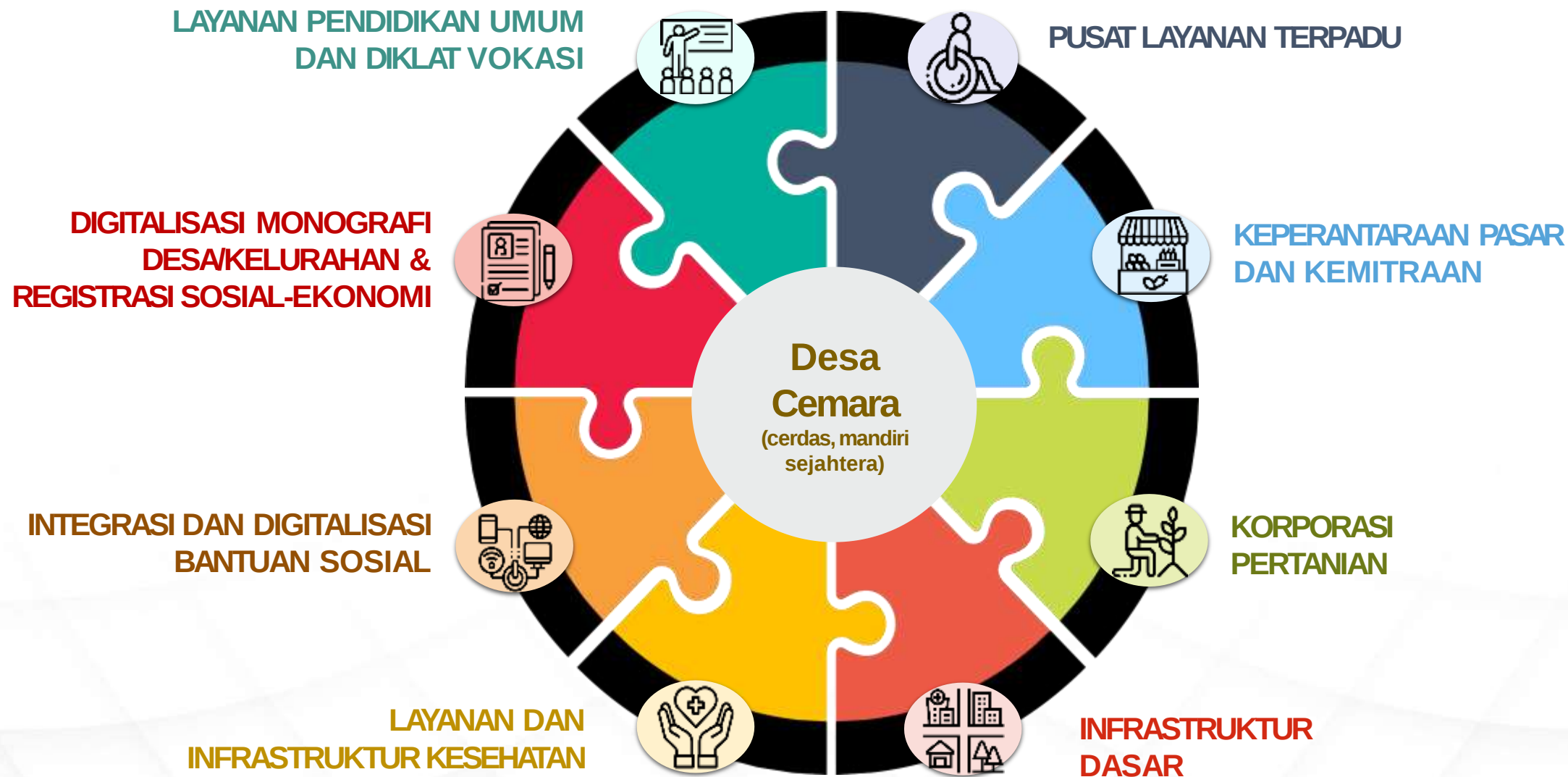
Regsosek

Bagi pakai dan pemanfaatan data Regsosek dengan optimalisasi **Sepakat**.

Pengembangan sistem oleh TELKOM untuk **bagi pakai dan pemadanan** data Regsosek dengan data K/L/D

Menyusun INPRES sebagai dasar **tata kelola** pemanfaatan Regsosek oleh K/L lintas sektoral dan Pemerintah Daerah.

Dengan Regsosek, Intervensi Multisektor dan Intervensi Berbasis Bukti Hingga ke Desa/Kelurahan



Strategi Konvergensi dan Kolaborasi Lintas Sektor



1. Percepatan Integrasi Data dan Kebijakan

- Gunakan Sistem Regsosek sebagai basis tunggal penargetan program, integrasikan dengan data P3KE, kependudukan, dan SDGs.
- Kembangkan dashboard pemantauan real-time untuk program kemiskinan ekstrem (contoh: aplikasi SiMiskin).

2. Inovasi Pendanaan Berkelanjutan

- Tingkatkan skema blended finance (e.g., social impact bonds) untuk proyek hijau dan pemberdayaan UMKM.
- Alokasikan Dana Insentif Daerah (DID) secara afirmatif ke daerah tertinggal dengan beban kemiskinan tinggi.

3. Penguatan Kapasitas Daerah & Kolaborasi

- Libatkan akademisi/swasta dalam pendampingan teknis daerah (Triple Helix), khususnya untuk ekonomi hijau.
- Wajibkan IKU penurunan kemiskinan ekstrem dalam RPJM Daerah dan sinkronkan dengan RPJPN.

4. Transformasi Program Perlindungan Sosial Adaptif

- Kembangkan "PKH Plus" integrasi bantuan tunai dengan pelatihan keterampilan hijau (e.g., pertanian regeneratif, energi terbarukan).
- Perluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga 99,5% dengan insentif bagi usaha informal.

5. Mitigasi Risiko Spesifik Daerah

- Gunakan local champion (tokoh adat/pemuda) untuk atasi kendala geografi-sosial di Papua, Maluku, dan kepulauan terpencil.
- Sediakan infrastruktur digital inklusif (e.g., Pasar Digital Desa) untuk

"Kemiskinan Bukan Takdir: Integrasi Holistik Kunci Menuju Indonesia Sejahtera 2045"

Sumber Rekomendasi: Analisis Kebijakan Bappenas 2025 & Tantangan Implementasi DaerahUMKM perdesaan.

TERIMA KASIH

Kementerian PPN/Bappenas

Menara Bappenas Kuningan, Lantai 7.

Jl. H. R. Rasuna Said, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

